

**ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA MODAL PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

NAMA: MAIMUNAH
NIRM : 1210099201248

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2017**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA MODAL PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

NAMA : MAIMUNAH
NIRM : 1210099201248

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Ranti Utami, SE., M. Si., Ak. CA
NIDN. 103008301

Sari Wahyunie, SE, M.Ak, Ak
NIDN. 1007036603

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Sri Kurnia, SE. Ak. M.Si. CM
NIDN. 1007036603

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA MODAL PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : MAIMUNAH
NIRM : 1210099201248

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian pada
Tanggal...Bulan...Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Sri Kurnia, SE. Ak. M.Si. CM

NIDN. 1018046601

Ranti Utami, SE., M. Si., Ak. CA

NIDN. 1030087301

Anggota,

Ranti Utami, SE., M. Si., Ak. CA

NIDN. 1030087301

Tanjungpinang, 2017
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,

Sari Wahyunie, SE, M.Ak, Ak

NIDN. 1023067001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAIMUNAH
NIM / NIRM : 12110248 / 1210099201248
Tahun Angkatan : 2012
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.84
Program Studi / Jenjang : AKUNTANSI / S-1
Judul Usulan Penelitian : Analisis Efektivitas Belanja Modal Pada Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 23 / 10 / 2017

Penyusun,

Mat Rp. 6.000

MAIMUNAH

NIRM. 1210099201248

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA MODAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**, Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman yang selalu berjuang mengikuti risalahnya, dan semoga kita termasuk di antara mereka, ummat yang selalu memperjuangkan dan menegakkan Islam dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Sari Wahyunie, SE., M.Ak., Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Sri Kurnia, SE., Ak. M. Si. CA selaku Ketua Program Studi Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Ibu Ranti Utami, SE., M. Si., Ak. CA selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus dosen Pembimbing II dan selaku Wakil ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, membantu dan memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen beserta Kepala BAUK / BAAK dan staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang baik dan sabar menyampaikan ilmu pengetahuan dan bantuan yang diberikan.
6. Bapak / Ibu staff Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan informasi dan data kepada penulisan untuk mengizinkan penulis melakukan penelitian skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua dan keluarga tercinta yang selama ini selalu melimpahkan cinta dan kasih sayang yang luar biasa juga dengan tulus selalu mendoakan dan memotivasi penulis.
8. Untuk suami tercinta Ronaldi yang selalu memberikan semangat dan doanya
9. Untuk kak Puji Eka Safitri yang telah membantu mengumpulkan data.
10. Untuk Rekan-Rekan saya (pak Awen, pak Dodi, bang Eko, kak Sari, Noven, kak Dita, Lina, bang Hence, bang Dayat) yang selalu memotivasi dan memberikan semangat penulis untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
11. Kepada Teman-teman S1 Akuntansi Malam T.A 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta membalas amal kebaikan kita semua, aamin.. Akhir kata dengan kerendahan hati dan keterbatasan kemampuan penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, 16 Oktober 2017

Penulis,

MAIMUNAH

NIRM 1210099201248

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME.....	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2. PERUMUSAN MASALAH	3
1.3. BATASAN MASALAH.....	3
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN.....	4
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.8.PENELITIAN TERDAHULU	42
2.9. KERANGKA PEMIKIRAN	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 METODE PENELITIAN.....	46
3.2 JENIS DATA	47
3.3.METODE PENGUMPULAN DATA.....	47
3.4. TEKNIK ANALISIS DATA.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51

B. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.2. KESIMPULAN	76
5.2. KETERBATASAN PENELITIAN.....	77
5.3. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	80

ABSTRAK

Maminuah, 1210099201248

ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA MODAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Skripsi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, Oktober 2017, (viii + 78 Halaman + 5 Tabel + 2 Gambar + 6 Lampiran)

Kata kunci : Belanja modal, efektifitas, Dinas Pekerjaan Umum, Aset.

Belanja modal pemerintah adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Efektifitas belanja modal perlu diukur guna menelusuri ketepatan belanja yang dilakukan pemerintah dalam satu periode anggaran.

Objek penelitian ini adalah pelaporan belanja modal yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang berupa Rencana Kegiatan anggaran dan Laporan Realisasi anggaran pada tahun 2014 hingga 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan belanja modal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 adalah Rp 465.851.850.800. pada tahun 2015 besarnya belanja modal adalah sebesar Rp 209.814.455.834 dan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 146.057.946.046. Tingkat efektifitas belanja modal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 adalah 90% yang berarti efektif. Tingkat efektifitas belanja modal pada tahun 2015 adalah sebesar 99% yang juga berarti efektif. Tingkat efektifitas belanja modal pada tahun 2016 adalah sebesar 57% dan dikatakan tidak efektif.

Referensi : 5 Buku (2010 -2013)
6 Jurnal (2007-2013)

Dosen Pembimbing I : Ranti Utami, SE., M. Si., Ak. CA

Dosen Pembimbing II : Ranti Utami, SE., M. Si., Ak. CA

ABSTRACT

Government capital expenditures are budgetary expenditures to acquire fix assets and other assets that benefit more than annually accounting period. Capital expenditure is a component of direct expenditure in government budgets that produce output in the form of fix assets. The effectiveness of capital expenditures needs to be measured to track the accuracy of government spending within a budget period.

The object of this research is capital expenditure reporting done by Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan in Province of Kepulauan Riau in the form of Budget Activity Plan and Budget Realization Report from 2014 until 2016.

The results of this study shows the capital expenditure of Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan in Province of Kepulauan Riau in 2014 is Rp 465,851,850,800. Then in 2015 the amount of capital expenditure is Rp 209,814,455,834 and in 2016 is Rp 146,057,946,046. The level of effectiveness of capital expenditure Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan in Province of Kepulauan Riau in 2014 is 90% which means effective. The effectiveness of capital expenditure in 2015 is 99% which also means effective. The level of effectiveness of capital expenditure in 2016 is 57% and is said to be ineffective.

Keywords: Capital expenditure, effectiveness, Public Works Department, Assets.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan di era otonomi daerah sekarang ini adalah ketidakmerataan pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu campur tangan Pemerintah Pusat di masa lalu menyebabkan daerah mengalami gangguan dan terhambatnya pengembangan potensi yang dimiliki daerah, sehingga proses pembangunan dan kehidupan berdemokrasi di daerah tidak berjalan lancar. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah melakukan berbagai tindakan guna menunjang dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Tindakan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dapat mengatasi kemiskinan masyarakat dilakukan dan disesuaikan dengan otonomi pemerintah. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah guna diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bernanda Gatot Tri Bawono, 2008:1)

Penafsiran atas Permendagri No. 13/2006 menyatakan bahwa besaran belanja modal sama dengan besaran penambahan asset di neraca yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut termasuk didalamnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Dalam prakteknya belanja modal berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan, namun peningkatan realisasi anggaran belanja modal yang diikuti dengan peningkatan realisasi belanja pemeliharaan setiap tahunnya tidak menjamin asset dapat dipelihara sesuai dengan tujuan dari belanja pemeliharaan itu sendiri. Hal ini karena sering difiktifkan pertanggungjawabannya. Jika dicermati dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), atau dalam perhitungan APBD, biasanya anggaran belanja pemeliharaan terealisasi 100% habis tidak tersisa namun kita tetap menemukan aset-aset yang tidak terpelihara dengan baik bahkan ada yang tidak berfungsi atau rusak.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang sedang meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam mewujudkan semua itu pemerintah perlu meningkatkan pelayanan publik yaitu dengan meningkatkan asset tetap, untuk menambahnya pemerintah memberikan modal dimaksudkan untuk mendapatkan hasil tetap pemerintahan. Seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan adanya belanja modal maka akan mempengaruhi biaya atau belanja yang digunakan untuk menjaga dan memelihara aset-aset yang dimiliki Pemerintah provinsi kepulauan riau. Belanja tersebut dinamakan belanja pemeliharaan, namun, di samping aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD ada aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD. Dalam hal ini, perolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai

dan belanja barang dan jasa. Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menerima aset dari pihak lain, seperti aset yang berasal dari hibah. Hal ini sering membuat belanja pemeliharaan tidak mampu memelihara aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang, karena tidak seimbang jumlah aset yang dimiliki dengan anggaran belanja yang dapat terealisasi dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan latar belakang uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Efektivitas Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan :

“Apakah Anggaran belanja modal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sudah efektif dan sesuai peraturan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas anggaran belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.
2. untuk mengetahui apakah anggaran belanja modal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melihat tujuan dari tujuan peneliti yang penulis paparkan sebelumnya maka nantinya diharapkan dari hasil peneliti memiliki kegunaan antara lain :

1. Kegunaan secara praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kegunaan secara akademis

Sebagai bahan referensi dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan tentang efektifitas belanja modal, dan sebagai bahan bacaan untuk mengembangkan wawasan yang lebih luas khususnya di bidang ilmu akuntansi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan tentang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Efektifitas belanja modal.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menyajikan gambaran umum perusahaan, struktur organisasi penentuan belanja modal yang digunakan untuk pengelolaan data dan pengelolaan informasi, serta penerapan yang digunakan dalam pencatatan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis. Penulis mengajukan kesimpulan dari analisis data-data perusahaan, yaitu apakah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau memungkinkan untuk menerapkan efektifitas belanja modal. Saran berisi mengenai kemungkinan percobaan dan penerpan dalam transaksi yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa akuntansi menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk :

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen.
2. Pertanggungjawaban kepada investor, kreditur, badan pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa definisi mengenai akuntansi diantaranya yaitu menurut A.L Haryono Jusup (Muindro Renyowijoyo, 2008:2) definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Definisi dari sudut pemakaian, yaitu suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisiensi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.
2. Definisi dari sudut proses kegiatan, yaitu sebagai proses pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.

2.2 Akuntansi Pemerintahan

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, dibidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pengertian akuntansi pemerintah terdapat beberapa teori yang penulis kemukakan. Menurut Rachmat dalam Akuntansi Pemerintahan (2010:45), akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Sedangkan menurut Abdul Hafiz dalam akuntansi pemerintahan daerah (2007:35) akuntansi pemerintahan daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menurut Rachmat dalam Akuntansi Pemerintahan (2010:9) akuntansi pemerintahan berfungsi untuk mengontrol seluruh transaksi yang berhubungan dengan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan Negara, akuntansi membantu

Pemerintah berkaitan dengan penggunaan keuangan Negara yang hakekatnya merupakan uang rakyat.

Dalam pemerintahan reformasi dan otonomi daerah mulai ada perhatian yang besar terhadap penilaian kekayaan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2009:26). Tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sector publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisiensi, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

Pengertian diatas sendiri memiliki pengertian yang beragam sebagai suatu konsekuensi dari luasnya wilayah sektor publik, setiap disiplin ilmu (ekonomi, hukum, politik, dan sosial) mempunyai pemahaman dan definisi yang berbeda-beda. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulance*. Menurut Mardiasmo dalam bukunya akuntansi sektor publik (2009:3) mengatakan bahwa komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

Pemerintah berkepentingan untuk melakukan intervensi dalam hal penentuan kebijakan fiskal dan moneter, melakukan regulasi terhadap sektor swasta, pemberian barang dan pelayanan publik, serta pendistribusian pendapatan dan kekayaan secara adil dan merata. Alasan pemerintah melakukan intervensi

karena adanya kegagalan pasar (*market failure*) distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata serta menciptakan stabilitas dan pembangunan.

Dalam pembangunan, perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak ada artinya karena tidak ada tindak lanjut (*follow up*) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi yang telah dicapai. Sebaliknya, jika tidak ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian saling terkait sebagai mata uang dan membentuk siklus. Menurut Mardiasmo, dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2009:3) membagi perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap, yaitu :

1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar,
2. Perencanaan operasional,
3. Penganggaran,
4. Pengendalian dan pengukuran,
5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik.

2.2.2 Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi mana yang dipakai oleh suatu organisasi tertentu, tergantung pada kebijakan dan kondisi yang ada.

Menurut Abdul Halim (2012:53) dalam Praktek Akuntansi Pemerintahan, ada berbagai basis akuntansi, yaitu :

1. Basis Kas (*Cash Basic*)

Dalam Metode *Cash Basis*, pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat dibayarkan. Artinya mencatat beban apabila didalam transaksi jurnal *entry* ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Didalam basis ini, beban tidak diakui sampai uang dibayarkan walaupun beban terjadi pada bulan lalu. Dalam kata lain basis kas mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

2. Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Towards Accrual*)

- a. Basis Kas : untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. Basis Akrual : untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas, entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya namun tetap menyajikan Laporan Realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jadi basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c. Basis Akrual (*Accrual Basic*) : dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan diakui ketika penjualan terjadi dan pengeluaran (belanja) diakui ketika barang atau jasa diterima. Dengan kata lain basis aktual mengakui adanya hak atau kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan.

2.3 Akuntansi Keuangan

Mengacu pada pendapat Garrison, dkk (2006:4) pengertian akuntansi keuangan dapat dikemukakan sebagai suatu penyajian atas laporan keuangan yang dimana berkaitan dengan penyediaan informasi untuk pemegang saham, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berada diluar organisasi. Menurut Sofyan (2007:4) menyatakan bahwa pengertian akuntansi adalah alat kapitalis untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akumulasi kekayaan berjalan lancar dan penguasaannya tetap ditangan kapitalis.

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,

Laporan keuangan menurut Martono dan Agus (2010:51) adalah ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut Brigham dan Houston (2010:84) yang diterjemahkan oleh Yulianto, laporan keuangan yaitu beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis

diatasnya tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada dibalik angka-angka tersebut.

Sedangkan menurut Fahmi (2011:2) laporan keuangan adalah merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat oleh setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan, dan tujuan laporan keuangan itu sendiri menurut Sukardi dan Kurniawan (2010:187) yaitu antara lain :

1. Sebagai bahasa bisnis yang mudah dimengerti oleh semua pihak.
2. Menunjukkan logika hubungan timbal balik antara pos-pos didalam laporan keuangan.
3. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Fahmi (2011:6) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Fahmi (2011:5) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi perusahaan melalui sudut angka-angka dalam suatu moneter.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas Dana
4. Pendapatan
5. Belanja
6. Transfer
7. Pembiayaan, dan
8. Arus kas

2.4.3 Manfaat Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2011:4) manfaat laporan keuangan adalah untuk mengukur usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya.

Menurut Sukardi dan Kurniawan (2010:187) manfaat laporan keuangan antara lain :

1. Bagi manajemen
Sebagai dasar untuk memberi kompensasi.
2. Bagi pemilik perusahaan
Sebagai dasar untuk menilai peningkatan nilai perusahaan.
3. Bagi supplier
Untuk mengetahui besarnya kemungkinan pembayaran hutang.
4. Bagi Bank
Sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut likuid dan mempunyai cukup *working capital*.

Sedangkan menurut Martono dan Agus (2010:52) laporan keuangan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan investasi
2. Keputusan pemberian kredit
3. Penilaian aliran kas
4. Penilaian sumber ekonomi
5. Melakukan klaim terhadap sumber dana
6. Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana
7. Menganalisis penggunaan dana

2.4.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

1. Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang meliputi :

- a. Ketaatan terhadap APBN/APBD
- b. Informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA
- c. Pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,

akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut :

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu :

- a. Saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya)
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan

- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL tidak memiliki perbedaan baik pada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek
- h. Kewajiban jangka panjang
- i. Ekuitas

5. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan

keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitori

6. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukanlah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah. Sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara pragmatis. Pemahaman yang memadai terhadap komponen-

komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilaporan pertanggungjawaban keuangan negara.

CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lebar muka laporan keuangan.

2.5 Pengertian Belanja

Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung kepada berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank. Beban dapat berarti pengakuan biaya-biaya non-kas baik karena penyusutan, amortisasi, penyesihan, atau cadangan itu sendiri. Berdasarkan manfaatnya, biaya yang terjadi

pada suatu periode dapat diklasifikasikan sebagai operasi dan non-operasi Indra Bastian (2006:45)

Menurut Halim dan Kusufi (2014:288) belanja adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit anggaran (allotment). Dalam pengakuan belanja dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dijelaskan bahwa belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Pengakuan belanja melalui bendahara pengeluaran, yaitu pengakuan belanja yang terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu :

1. Belanja administrasi umum, yaitu belanja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan aparatur yang tidak mengakibatkan penambahan kekayaan (*asset*).
2. Belanja operasi, pemeliharaan sarana, dan prasarana publik adalah belanja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang tidak mengakibatkan penambahan kekayaan (*asset*).
3. Belanja modal atau investasi adalah belanja modal yang mengakibatkan penambahan kekayaan (*asset*).
4. Belanja transfer adalah belanja untuk kegiatan amal tanpa mengharapkan adanya pengembalian atau imbalan.
5. Belanja tak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang tidak dapat direncanakan dan bersifat luar biasa (*force major*).

Secara umum prosedur belanja bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai belanja atau biaya dari pengakuan sampai proses pencatatannya.
2. Untuk memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada, sehingga pemerintah daerah dapat memperhitungkan tingkat pengeluaran yang memungkinkan. Sebab disesuaikan dengan tingkat dan yang tersedia. Oleh karena itu, fungsinya sistem ini dapat juga sebagai pengendali pengeluaran.

2.5.1 Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP Nomor 24/2005

Berdasarkan SAP (PP No.24/2005) belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi Ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi kelompok belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Masing-masing kelompok belanja tersebut dirinci menurut jenisnya. Belanja daerah menurut jenisnya disusun sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Berdasarkan rincian jenisnya, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil.

2. Klasifikasi Organisasi Menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban uang/barang. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pemerintah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan lembaga teknis daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Klasifikasi Fungsi

Belanja modal menurut fungsi disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi berdasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.5.2 Kelompok Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara atau Daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja dalam tatanan akuntansi pemerintah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi,

organisasi dan fungsi. Pembahasan selanjutnya hanya akan kita fokuskan pada klasifikasi ekonomi.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

Adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, diantaranya :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Subsidi
- e. Belanja Hibah
- f. Belanja Bantuan Keuangan / Sosial
- g. Belanja Bagi Hasil
- h. Belanja Modal
- i. Belanja Lain-lain atau tidak terduga

Penjelasan dari masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja penghasil pimpinan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan belanja barang, jasa, ongkos kantor, perjalanan dinas dan pemeliharaan. Belanja bunga

digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutau/pinjaman daerah baik yang bersifat pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang.

- c. Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang sah untuk mendukung kemampuan daya beli masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Pihak-pihak tertentu seperti kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah di luar wilayah Provinsi, atau hibah dari Kabupaten atau Kota kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi atau dari Provinsi, Kabupaten/Kota kepada perusahaan Daerah/BUMD, Perusahaan Negara/BUMN dan masyarakat.
- e. Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana yang bersumber dari pendapatan Provinsi yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota yang dibagi hasilkan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Belanja bantuan keuangan/sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, badan/lembaga/organisasi sosial

kemasyarakatan, partai politik dan organisasi profesi. Belanja bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan /atau kepada Pemerintah Desa atau bantaun keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan atau bantuan keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dapat dikelompokkan ke dalam bantuan bersifat umum (*block grant*) atau bantuan bersifat khusus (*specific grant*).

- g. Bantuan keuangan bersifat umum merupakan bantuan yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- h. Bantuan Keuangan bersifat khusus merupakan bantuan yang diberikan kepada Kabupaten /Kota/Pemerintahan Desa tertentu yang pedoman penggunaannya dapat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan prioritas Provinsi/Kabupaten/Kota atau sesuai dengan usulan Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa yang membutuhkan.
- i. Belanja tidak terduga, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran guna penanganan bencana alam, bencana sosial, atau penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang sangat mendesak diperlukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang dananya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

2.. Belanja Tidak Langsung

Adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, diantaranya :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasa 106 ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa .

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yang termasuk dalam golongan kelompok belanja langsung yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah merupakan belanja pegawai yang berisi pengeluaran honorarium/upah dan penghasilan terkait langsung dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi:

- a. Honorarium, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemabayaran honor personal/orang yang secara langsung melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Contoh : honor bulanan, harian, dan proyek.
- b. Upah lembur, yaitu pengeluaran untuk pemberian upah pada pegawai karena bekerja diluar jam kerja. Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 jam kerja untuk lima hari kerja dalam

sehari yakni 7 jam 30 menit. Sementara untuk 6 hari kerja lembur yang dapat dilakukan.

- c. Upah, yaitu pengeluaran untuk pemberian upah pada pegawai harian yang meliputi upah harian tetap dan upah harian lepas.
- d. Insentif, yaitu pengeluaran guna pemberian uang insentif orang/personel yang bekerja untuk suatu kegiatan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang, yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan, atau penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan investasi kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat atau daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 52 ayat 1 Belanja Barang/Jasa sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa yang dimaksudkan berupa belanja barang habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung atau

gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas dan pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain pengadaan barang atau jasa dan bahan lainnya yang sejenis. Permasalahan yang seringkali menjadi temuan dalam pengelolaan barang dan jasa antara lain adalah kemahalan harga pengadaan dan salah dalam penganggaran. Contoh salah penganggaran adalah jasa perencanaan, pengawasan, dan konsultasi dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang dan jasa. Belanja tersebut sesuai dengan SAP seharusnya dianggarkan dalam belanja modal karena akan menambah nilai asset tetap yang dihasilkan. Agar mudah dimengerti, belanja barang dan jasa dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

a. Kelompok I

Belanja barang habis pakai, bahan/material, belanja cetak dan pengadaan jumlah anggaran didasarkan kebutuhan rill, setelah mempertimbangkan besaran organisasi, tupoksi dan aktivitas/program/kegiatan administrasi SKPD. Kebutuhan rill mengharuskan dilakukan pencatatan persediaan, jumlah pengadaan setiap bulannya tidak sama sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dan mengakui sistem dan prosedur pengadaan yang berlaku.

b. Kelompok II

Belanja jasa kantor umumnya merupakan pembayaran atas tagihan dari pihak ketiga seperti listrik, telepon, air, surat kabar, dan sejenis bukti

pembayaran dapat diserahkan. Sementara belanja pemeliharaan tujuannya untuk memperpanjang nilai guna aset melalui pemeliharaan berkala, perbaikan atau reparasi dan pergantian suku cadang dengan memperhatikan besaran biaya yang dikeluarkan dengan nilai aset yang dipelihara. Belanja pemeliharaan rutin yang menggunakan jasa pihak ketiga harus mengikuti ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak diperkenankan memecah/membagi anggaran dengan alasan apapun.

c. Kelompok III

Belanja Premi asuransi dan belanja sewa. Belanja premi asuransi dan belanja sewa dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kelompok IV

Belanja perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya lima kilometer dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.

2.6 Modal

2.6.1 Pengertian Modal

Modal merupakan suatu yang baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang digunakan dalam proses usaha untuk mencapai dan menghasilkan tujuan

perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan. Sedangkan jika melihat dari sisi kewajiban maka modal adalah kewajiban perusahaan terhadap pemilik perusahaan.

Modal merupakan hak yang dimiliki perusahaan, komponen modal yang terdiri dari modal setor, agio saham, laba di tahan, cadangan laba dan lainnya. (Kasmir, 2010:311)

Schwiedland (dalam Riyanto, 2010:18) memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas dimana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang (geldkapital), maupun dalam bentuk barang (sachkapital), misalnya mesin, barang dagangan, dan lain sebagainya.

2.6.2 Jenis-Jenis Modal

Terminologi modal menunjukkan sumber dana yang digunakan pada suatu perusahaan. Modal meliputi semua komponen disisi pasiva pada neraca perusahaan kecuali hutang lancar. Modal terdiri dari modal utang dan modal sendiri atau ekuitas

Jenis-jenis modal antara lain :

1. Modal Pinjaman

Termasuk semua pinjaman jangka panjang yang diperoleh perusahaan. Diketahui bahwa biaya modal pinjaman relatif lebih rendah dibandingkan dengan bentuk pinjaman lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka memperoleh resiko yang relatif kecil atas segala jenis modal jangka panjang, seperti :

- a. Pemegang modal pinjaman mempunyai prioritas terhadap pembayaran bunga atas pinjaman atau terhadap aset yang akan dijual untuk membyar utang.
- b. Pemegang modal pinjaman mempunyai kekuatan hukum atas pembayaran hutang dibandingkan dengan pemegang saham preferen atau saham biasa.
- c. Bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak sehingga biaya modal pinjaman yang sebenarnya secara substansial menjadi lebih rendah.

2. Modal Sendiri atau Ekuitas

Merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan/pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjamn mempunyai jatuh tempo. Ada dua sumber utama modal sendiri, yaitu :

- a. Modal saham preferen yang merupakan bentuk khusus kepemilikan perusahaan dimana deviden diperoleh secara tetap serta pembayarannya harus didahulukan dari deviden saham biasa.
- b. Modal saham biasa yang terdiri atas saham biasa dan laba ditahan. Saham biasa merupakan bentuk modal sendiri yang paling mahal biaya modalnya diikuti dengan laba ditahan dan saham preferen.

Hubungan antara modal pinjaman dan modal sendiri mempunyai perbedaan utama dalam hak suara, tuntutan atas pendapatan dan aset, jatuh tempo

dan perlakuan pajak atas biaya modal. Harus dipahami posisi pemegang modal sendiri adalah sekunder dibanding pemegang modal pinjaman. Pemegang modal sendiri menanggung resiko yang lebih besar sehingga kompensasi bagi pemegang modal sendiri harus lebih tinggi dibanding dengan pemegang saham pinjaman.

2.6.3 Sumber-Sumber Penawaran Modal

Menurut Riyanto dalam bukunya Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan (2010:209), sumber penawaran modal terbagi dari dua yaitu :

1. Sumber-sumber penawaran modal menurut asalnya
2. Sumber-sumber penawaran modal menurut cara terjadinya

Dalam sumber-sumber penawaran modal menurut asalnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Sumber Internal (*Internal Sources*)

Sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah keuntungan yang ditahan atau laba yang ditahan (*retained net profit*) dan penyusutan (*depreciations*).

a. Laba ditahan

Besarnya laba yang dimasukkan dalam cadangan atau laba ditahan. Selain tergantung kepada besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu. Juga tergantung kepada *dividend policy* dan *plowing back policy* yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. Meskipun laba yang diperoleh selama periode tertentu besar, tetapi oleh karena perusahaan mengambil kebijakan bahwa sebagian besar dari laba tersebut dibagikan sebagai deviden, maka bagian laba yang dijadikan

cadangan kecil. Yang ini berarti bahwa sumber intern yang berasal dari cadangan adalah kecil jumlahnya.

b. Penyusutan

Sumber intern selain berasal dari laba atau cadangan juga berasal dari depresiasi. Besarnya depresiasi setiap tahunnya adalah tergantung kepada metode depresiasi yang bersangkutan. Sementara sebelum depresiasi tersebut digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti, dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat pergantian tersebut. Selama waktu itu depresiasi merupakan sumber penawaran modal di dalam perusahaan itu sendiri. Makin besar sumber internal dari dana yang dihasilkan di dalam perusahaan yang bersangkutan.

2. Sumber Eksternal

Sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber eksternal berasal dari para kreditor dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditor merupakan utang bagi perusahaan dan modal yang berasal dari pada kreditor tersebut ialah apa yang disebut modal asing/modal pinjaman. Modal yang berasal dari pemilik, peserta, atau pengambil bagian dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan, dan dana ini dalam perusahaan akan menjadi modal sendiri.

Dalam sumber-sumber penawaran modal menurut cara terjadinya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Tabungan

Tabungan ialah pendapatan yang tidak dikonsumsi. Suatu perusahaan dikatakan mengadakan tabungan apabila perusahaan menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya untuk pembentukan cadangan yang bertujuan antara lain untuk memperkuat basis finansial atau untuk membiayai ekspansi di kemudian hari. Memperkuat basis finansial misalnya dengan mengadakan investasi dalam earning assets. Untuk mempelajari perluasan perusahaan di kemudian hari perlu dibentuk cadangan. Dengan demikian maka tabungan ini merupakan sumber internal bagi perusahaan

2. Penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh Bank

Sebagian sumber kedua dari penawaran modal adalah penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh Bank. Yang dapat menciptakan uang itu tidak hanya bank sirkulasi tetapi juga bank-bank dagang yang menciptakan uang giral.

3. Intensifikasi Penggunaan Uang

Cara ini dapat dilakukan oleh bank dengan meminjamkan kembali uang-uang yang dipercayakan atau disimpan oleh masyarakat di Bank. Perusahaan-perusahaan produksipun dapat mengintensifkan penggunaan uang yang sementara menganggur misalnya dengan

meminjamkan kepada perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan atau untuk digunakan sendiri dalam perusahaan untuk seluas-luasnya perusahaan.

2.6.4 Jenis-Jenis Modal

Riyanto (2010:227) membagi jenis-jenis modal menjadi dua, yaitu :

1. Modal Asing atau Utang

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja diperusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan perusahaan tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Menurut waktu pemakaiannya, modal asing atau utang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Modal asing atau utang jangka pendek

Modal utang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya.

b. Modal asing atau utang jangka menengah

Modal asing atau utang jangka menengah adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun. Kebutuhan membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi dengan kredit jangka pendek disatu pihak dan juga sukar dipenuhi dengan kredit jangka panjang dilain pihak.

c. Modal asing atau utang jangka panjang

Modal utang jangka panjang umumnya lebih dari sepuluh tahun. Utang jangka panjang ini umumnya digunakan untuk membiayai perluasan usaha. Karena kebutuhan modal tersebut untuk melengkapinya dalam jumlah yang besar.

2. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya.

Modal sendiri menurut Riyanto (2010:240) terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Modal Saham

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Bagi perusahaan yang diterima dari hasil penjualannya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun bagi pemegang saham itu sendiri bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya.

b. Cadangan

Cadangan disini merupakan cadangan yang terbentuk dari keuntungan yang diperoleh dari perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Tidak semua cadangan masuk dalam cadangan modal sendiri adalah :

- 1) Cadangan ekspansi
- 2) Cadangan Modal kerja

3) Cadangan selisih kurs

4) Cadangan umum atau tak terduga

c. Laba di tahan

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai deviden dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan diatas. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu tentang penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan.

2.7 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat seperti (jalan, jembatan, trotoar, gedung olahraga, stadion, *jogging track*, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik seperti (gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada saat setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. (Syukriy Abdullah, 2013:15). Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset

atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
2. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap. Deddi Nordiawan (2006:86). Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam APBN/APBD. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:67), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian atau pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar beli atau bangun aset. (Permendagri 13 Tahun 2006).

Sedangkan berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 (dalam Kurniawati, 2010) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan

pengelolaan jalan dan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran biaya/yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi serta jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja Modal Instansi diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 yang mengklasifikasikan belanja pemerintah sebagai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Sedangkan Rincian belanja modal dijelaskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02.

Menurut PSAP Nomor 02 Paragraf 37, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tak berwujud.

1. Pengeluaran untuk Perolehan Awal Aset Tetap/Aset Tak Berwujud

Belanja Modal untuk perolehan aset tetap/aset tak berwujud meliputi harga beli aset tetap/aset lainnya ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap/aset lainnya tersebut siap untuk digunakan. Misalnya, biaya transportasi,

biaya uji coba, biaya perjalanan dinas dan biaya lainnya yang terkait dengan perolehan aset tetap/aset tak berwujud. Biaya-biaya tersebut harus dianggarkan dalam DIPA sebagai Belanja Modal. Agar rencana pembelian/ pembangunan suatu aset tetap atau aset tak berwujud dapat dianggarkan dalam Belanja Modal dan realisasi belanjanya juga dikategorikan sebagai Belanja Modal, perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset tak berwujud sehingga menambah asset pemerintah;
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Perolehan aset tersebut diniatkan untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap/aset tak berwujud hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknis aset.

2. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal, jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
- b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap.
- c. Belanja Lain-Lain.

2.8 Penelitian Terdahulu

Rusita Untari (2014), dalam penelitiannya analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung dinas pendidikan kota semarang. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja langsung sebesar 43.5 %. Pada tahun 2011 perhitungan tingkat efisiensi sebesar 43.6 % dan di tahun 2012 sebesar 46.2%, dari hasil kedua tahun tersebut bahwa dinas pendidikan kota semarang dalam melaksanakan belanja langsung sangat efisien dan belanja langsung dinas pendidikan kota semarang rata-rata tingkat efektivitasnya sebesar 97.74%. pada tahun 2011 ini semua program dan kegiatan di tahun ini sudah dijalankan semua dan hasil analisis tingkat efektivitas pada belanja langsung tahun 2011 sebesar 98.78% dengan kategori efektif.

Sri Hayati Br. Sembiring (2009), dalam penelitiannya analisis pengaruh belanja modal dan PAD terhadap belanja pemeliharaan dalam anggaran penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 0,506 atau 50,6. Hal ini berarti apabila nilai koefisien lainnya tetap (tidak berubah), maka kenaikan belanja modal sebesar 1% akan menaikkan belanja pemeliharaan sebesar 0,506 atau 50,6. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan dan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,408. Hal ini mengandung arti bahwa nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap (tidak berubah), maka kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah 1% akan menaikkan belanja pemeliharaan sebesar 40,8%. Belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah dipandang memiliki pengaruh yang amat signifikan terhadap belanja pemeliharaan, karena nilai pengaruh dari kedua

faktor tersebut mencapai 91,40%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh belanja rutin, Dana Alokasi Umum, DAK, dan faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) dalam penelitiannya belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja pemeliharaan dalam Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Buleleng). Hasil penelitiannya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan karena hubungan korelasi yang sangat kuat meskipun persentase rata-rata kenaikan tiap tahunnya lebih tinggi belanja pemeliharaan. Belanja modal berpengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,944. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,926. Secara simultan PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,125. Dalam penelitian anggaran 2008 sampai Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah tidak terlalu bergantung bantuan transfer dari pusat dalam melakukan kegiatan belanja daerah dan sudah bisa melaksanakan otonomi daerah sepenuhnya karena Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Tahun anggaran 2008 hingga 2012 cukup untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Buleleng tanpa harus menggunakan Pendapatan Asli Daerah secara berlebihan.

Siti Nur Rohmah, 110099201410 (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang) dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan Dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Kabupaten Bintan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda dan uji hipotesis.

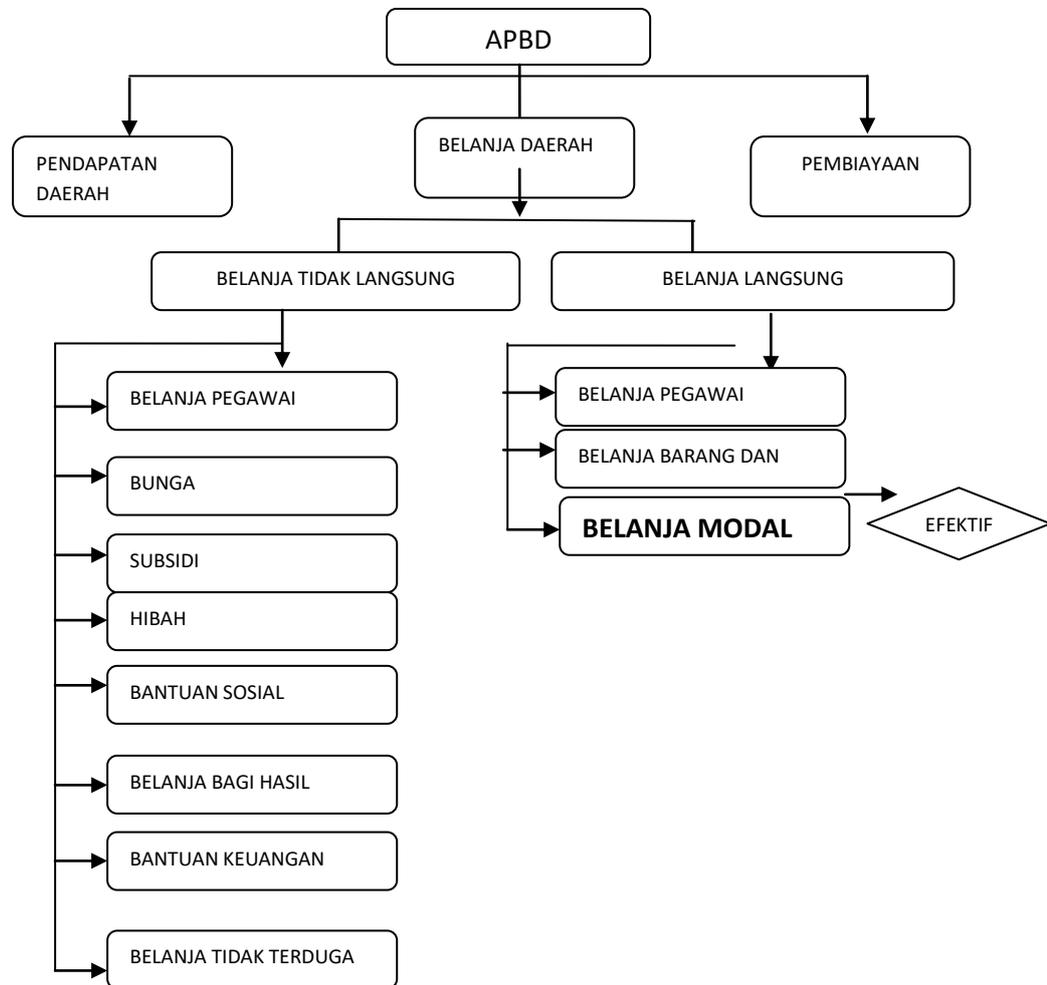
Berdasarkan pengujian menunjukkan data penelitian berdistribusi normal. Dilihat dari kontribusi belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi belanja modal dalam realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 0,875 atau sebesar 87,5% dengan persamaan regresi $Y = 2350012627,776 + 0,036X_1 + 0,049X_2 + e$.

Dengan kesimpulan yang dapat diambil adalah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan dikarenakan berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas signifikan belanja modal 0,021 lebih kecil dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} 2,800 > t_{tabel} 2,1447$. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemeliharaan dikarenakan berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas signifikan Pendapatan Asli Daerah 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} 4,117 > t_{tabel} 2,1447$. Belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan dikarenakan berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas signifikan belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai $F_{hitung} 41,927 > F_{tabel} 3,89$.

2.9 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, (2010:22) kerangka pemikiran adalah apa yang harus digambarkan dalam bentuk diagram skematis sehingga pembaca dapat dengan

jelas melihat hubungan antar variabel. Berikut dapat penulis bentuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:5) menjelaskan bahwa metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan ditemukan, dikembangkan, dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan menginspirasi masalah dalam bidang bisnis tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode kualitatif.

Metode deskriptif yaitu bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah/keadaan untuk mengetahui keberadaan suatu masalah, besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah. Biasanya penelitian deskriptif menggambarkan suatu masalah/keadaan dengan menguraikan berdasarkan variabel penelitian agar lebih jelas dan mudah dipahami penjelasannya.

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu saling konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang di gunakan adalah data **sekunder** merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan., mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Adapun data yang dikumpulkan yaitu mulai di tahun 2014 sampai tahun 2016.

Data yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 hingga 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014-2016, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014-2016.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Didalam mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik :

1. Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi partisipasi pasif. Peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2008:66). Jadi, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian dan mencatat gejala atau fenomena yang diteliti.

2. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu (Molelang, 2006). Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang dijadikan sumber data.
3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar ddari seserang. (Sugiyono, 2013:422)
4. Studi Pustaka mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapataka landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. (Sarwono : 2006)

3.4 Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan metoe deskriptif taitu metode analisa data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpresentasikan, dianalisis, sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Analisis data dilakukan dengan melakukan perhitungan efektivitas berdasarkan Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif
2. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yg dimaksud *outcome* dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Belanja langsung dan *output* adalah Target Anggaran belanja langsung.

Selanjutnya perilaku belanja modal yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau apakah telah sesuai dengan Pasal 16 ayat 4 Undang-Undang no 17 tahun 2013 tentang “Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial”. Selain itu analisis juga apakah pelaporan belanja modal yang disajikan sesuai dengan PSAP No 2 paragraf 37 tentang belanja modal yang menyatakan “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud”.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Pulau Dompok Tanjungpinang.

Adapun profil sekretariat Dinas Pekerjaan Umum diantara lain adalah subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan evaluasi program, dan subbagian keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hafiz, Abdul T. 2007. *Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta,CV
- Gede Widyasa, Edy Sujana, Norman Ari Suyana Darmawan. 2014. *Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemeliharaan dalam Realisasi Anggaran*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelola Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Halim, Abdul dan Muhammad Sham Khusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Indra Bastian. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- _____. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan. Cetakan I*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Rusita Untari .2015 *Anamisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- Siti Nur Rohmah. 2015. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Ali Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan Dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan
- Sri Hayati Br.Sembiring,Sri Hayati. 2010. *Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Realisasi Anggaran Pmerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Sumatera Utara: Program Pascasarjana Universitas
- Straub. 2008. *Bisnis Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat
- Standar Akuntansi Pemerintahan No 24 Tahun 2005 tentang Realisasi Anggaran
- Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja

Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. 2006. Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang no 17 tahun 2013 Tentang Keuangan Negara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : MAIMUNAH
TEMPAT/TGL LAHIR : HINAI KIRI, 18 MEI 1993
ALAMAT : BATU KUCING NO 63
NO HP : 0812-7077-7443

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD : SD NEGERI 050701 PASAR GUNUNG TAHUN 2005
SMP : SMP NEGERI 1 SECANGGANG TAHUN 2008
SMA : SMA NEGERI 1 SECANGGANG TAHUN 2011
S1 : STIE PEMBANGNAN TANJUNGPINANG 2017

RIWAYAT ORGANISASI :

1. BEM SETIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG PERIODE 2014-2016

MOTTO :

مَنْ جَدَّوَجَدَ - Man Jadda Wajada

"sesiapa yang berusaha (In shaa Allah) akan mendapat apa yang diusahakannya".